

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Uni Soviet secara resmi berakhir tanggal 25 Desember 1991. Kehancuran Uni Soviet menjadikan Rusia harus mengembalikan eksistensi bangsanya yang berakar di masa lalu untuk masa kini dan masa depan. Pasca runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengalami masa transisi dalam sistem pemerintahannya. Rusia terlepas dari kekuasaan totaliterisme komunisme Imperium Soviet dan menata kembali kondisi stabilitas negaranya.

Pasca Uni Soviet (awal tahun 1992), Rusia terlepas dari kekuasaan totaliterisme komunisme Imperium Soviet dan memulai masa transisi di bawah pemerintahan Boris Yeltsin. Boris Yeltsin terpilih sebagai presiden lewat pemilu langsung pertama di Rusia pada Juni 1991. Lalu pada Oktober 1991, Yeltsin mencanangkan bahwa Rusia akan menjalankan reformasi ekonomi menuju mekanisme pasar secara radikal. Didalamnya termasuk program swastanisasi atas perusahaan-perusahaan negara. Setelah Oktober 1991, diluncurkanlah program-program yang kemudian terapi kejut (*shock therapy*), sesuai rekomendasi AS dan IMF. Padahal, perubahan sistem ekonomi dari sistem terencana menuju mekanisme pasar membutuhkan waktu lama dan bertahap. Pola bertahap inilah yang dipilih China dan beberapa negara di Eropa Timur, eks Blok Komunis. Pada dekade 1990-an, Konsensus Washington masih memiliki era keemasan dan dianggap sebagai jalan utama menuju kemakmuran. Oleh karena itu, Rusia pun bersedia menerima konsensus tersebut<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Saragih, S. (2008). *Bangkitnya Rusia*. Jakarta: Kompas.

Banyak dari sumber alam Rusia, termasuk gas dan minyak bumi, yang kemudian dijual kepada pihak swasta dan perusahaan-perusahaan luar negeri pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin karena kebutuhan uang yang banyak. Namun, di bawah Vladimir Putin, Rusia sedang mengejar ambisi nasionalismenya dan politik luar negerinya lagi secara agresif dan sekali lagi berusaha memenuhi kepentingan-kepentingannya lagi. Politik luar negeri yang baru ini telah membawa Rusia ke dalam konflik politik dengan Barat, dan telah membawanya kepada kemungkinan terjadinya sebuah perang dingin yang baru.

Pada masa pemerintahan Yeltsin, paradigma yang digunakan dalam menentukan kebijakan keamanan energi adalah energi dianggap sebagai komoditas pasar (*energy as a market commodity*)<sup>2</sup>. Hal ini tercermin dengan berkuasanya para oligarki Rusia dalam perekonomian negara. Sebut saja Mikhail Khodorkovsky, pemilik Yukos, dan wakil direktornya Boris Zolotarov, Roman Abramovich dan Boris Berezovsky, pemilik Sibneft, Vladimir Gusinsky dan masih banyak lagi. Dengan menyerahkan harga kepada mekanisme pasar membuat keuntungan yang didapat dari produksi energi hanya dirasakan oleh kaum oligarki saja sehingga kas negara kosong dan menyebabkan defisit anggaran yang tajam dan membuat hutang negara semakin membengkak.

Keadaan tersebut menjadikan perusahaan-perusahaan mereka menjadi maju dan besar dengan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Tak heran program privatisasi perusahaan negara semakin gencar direalisasikan pada masa ini. Sumber-sumber kekayaan negara yang terdiri dari minyak

---

<sup>2</sup> Keliat, M. (2006, Mei-November). Kebijakan Keamanan Energi. *Jurnal Politik Internasional "Global" Volume 8*, 40.

dan gas mereka kuasai tanpa kontrol dan campur tangan negara. Sumber daya alam Rusia telah dicuri lewat swastanisasi dengan tender yang curang. Selain terjadi proses pemindahan kepemilikan aset dari negara ke swasta, juga terjadi pemindahan kepemilikan aset dari swasta domestik ke swasta asing yang didominasi investor asal AS dan Barat. Hal inilah yang menempatkan Rusia pada keterpurukan ekonomi dan kebangkrutan total yang membuat pamor Rusia sebagai negara besar hancur, sehingga memaksa Yeltsin mundur dari jabatan kepresidenannya.

Semenjak Putin menjabat Presiden Rusia tahun 2000, politik luar negeri Rusia mulai berubah. Di bawah Gorbachev dan Yeltsin, Kremlin adalah teman bagi Barat. Saat itu Kremlin diisi oleh orang-orang yang berpandangan liberal, internasionalis dan pro-pasar. Namun, di bawah Gorbachev dan Yeltsin muncul kinerja Kremlin yang memperlihatkan kegagalan ekonomi, kegagalan militer, dan kegagalan di banyak bidang. Di bawah Putin, sisi ekonomi dan militer ingin diperkuat. Salah satunya adalah dengan menggunakan energi sebagai kekuatan diplomasi dalam politik luar negerinya. Kremlin di bawah Putin adalah Kremlin yang total berbeda<sup>3</sup>

Kekuatan energi yang dimiliki Rusia digunakan oleh Putin sebagai suatu paradigma yang memberlakukan energi sebagai komoditas strategis (*energy as strategic commodity*) yang mengakibatkan kebijakan yang menghasilkan intervensi negara<sup>4</sup>. Hal ini senada dengan apa yang telah dilakukan Putin dalam menjalankan kebijakan keamanan energinya di atas. Di samping itu, Putin juga dengan tegas memberangus para oligarki yang dulunya jaya di masa Yeltsin, dengan bantuan kaum “siloviki”. Siloviki adalah Bahasa Rusia yang berarti kekuasaan. Artinya, politisi Rusia yang berasal dari jajaran keamanan, militer, dan bahkan beberapa di antaranya eks

---

<sup>3</sup> Saragih, OP.cit

<sup>4</sup> Keliat, M, Op.cit , hlm 40

pegawai Komite Gosudarstvennoy Bezopasnosti/Komite Keamanan Negara (KGB), agen mata-mata Rusia yang pernah sangat disegani di dunia itu. Bagi Putin dan siloviki, negara harus mengontrol aktifitas ekonomi. Sebagai sektor bisnis yang strategis, perusahaan domestik harus dilindungi dari kekuatan globalisasi dan oligarki harus dihapus sebagai sebuah kelas. Lagi, bagi mereka kekayaan alam adalah milik rakyat dan atas nama rakyat. Negara harus mengontrol setiap eksploitasi kekayaan alam.

Peran asing pun dibatasi di sektor yang berkaitan dengan kekayaan alam. Seturut pandangan tersebut, pengambil-alihan kembali kekayaan negara dari swasta pun tak dapat terhindarkan. Disini dapat terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dalam kebijakan keamanan energi pada masa Boris Yeltsin yang menganggap energy sebagai komoditas pasar menuju era Putin yang lebih menganggap energi sebagai komoditas strategis.

Sumber daya energi merupakan sebuah kebutuhan pokok bagi seluruh negara di dunia karena sangat dibutuhkan untuk menggerakkan industri maupun diperlukan oleh rumah tangga, namun cukup eksklusif secara geografis. Hal ini terjadi terutama bagi gas. Gas menjadi energi dengan permintaan yang meningkat karena lebih ramah lingkungan dari minyak dan batu bara. Banyak Negara yang sangat membutuhkan gas karena kebutuhan rumah tangga yang memerlukan gas terutama untuk penghangat ruangan dan pembangkit listrik. Inilah mengapa sumber gas menjadi sangatlah eksklusif secara geografis.

Minyak dan gas telah membantu menstabilkan ekonomi Rusia dan memberikan dana untuk melakukan modernisasi sehingga membawa Rusia kembali menjadi Rusia yang kuat dalam ekonomi maupun militer. Rusia gencar memanfaatkan kekayaan alam dalam hal ini terutama gas, dengan kesempatan itulah Rusia mendapatkan kepercayaan diri akan kekuasaan

mulai lebih berkembang dan lebih luas. Bagi Rusia, ekspor minyak dan gas alam merupakan penyumbang terbesar pendapatan luar negerinya<sup>5</sup>. Oleh karena itu, Rusia melakukan segala sesuatu untuk meningkatkan produksi energi untuk revitalisasi ekonomi dan politik.

Kekuatan energi ini menyangkut dua hal, yaitu berupa ketersediaan sumber alam yang memadai di dalam negerinya dan akses sumber energi di luar negeri, serta teknologi dan kemampuan sumber daya manusianya untuk mengelola teknologi tinggi tersebut, dengan gas dan energi itulah perekonomian Rusia mulai membaik. Ongkos pengilangan minyak dan gas di Rusia memang relatif tinggi. Tidak diragukan Rusia mempunyai cadangan energi yang amat besar, dan penguasaan atas energi memiliki potensi untuk digunakan sebagai kekuatan dalam politik internasional. Oleh karena itu sesungguhnya terbuka kesempatan besar bagi Rusia untuk meningkatkan peranannya di dunia internasional.

Dibawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia memiliki fokus kebijakan pada pemanfaatan energi negaranya. Penggunaan energi dalam kebijakan suatu Negara merupakan bentuk implementasi dari diplomasi ekonomi yang telah dijalankan pada umumnya. Kebijakan ini dijalankan dengan memanfaatkan segenap potensi dan kekayaan ekonomi negara yang berasal dari sumber daya energi berupa gas dan minyak bumi untuk mencapai kepentingan nasional negara yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus demi

---

<sup>5</sup> Barden, J. (2017, November 14). U.S Energy Information and Analysis. Diakses dari eia.gov:

<https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=33732>

pada 11 desember 2018

meningkatkan kekuatan nasional dalam mempengaruhi negara lain<sup>6</sup>.

Dibawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia terus berusaha melakukan berbagai kerjasama sebagai usaha pendekatan dan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara Asia Tengah. Salah satu dari kerjasama Rusia di luar negeri adalah Ekspolrasi Tengah Laut (Offshore) dengan Negara Asia Tengah ialah The Kurmangazy Project. Kurmangazy Structure (Kalinsky) terletak di rak utara Laut Kaspia. Lapisan produktif terletak pada kedalaman 300-2000meter. Setelah sempat terjadi penundaan yang lama, pada 13 Mei 2002 Presiden Putin dan Nazarbayev menandatangani Protokol Perjanjian pada Bagian Utara Laut Kaspia<sup>7</sup>.

Rosneft berpartisipasi dalam sebuah proyek untuk menggali dan mengembangkan struktur Kurmangazy, yang terletak di Kazakhstan bagian dari rak Laut Kaspia Antara bidang Kashagan dan Shirotnoye. Kisaran partisipasi proyek :  
Rosneft - 25%  
KazMunaiGaz - 50%  
Pemilik sisa 25% belum ditentukan;

Namun, pada tahap eksplorasi Rosneft memenuhi kewajibannya untuk saham ini. Federasi Rusia memiliki opsi pada saham, yang bisa digunakan dari hidrokarbon komersial ditemukan. Menurut rencana mitra proyek, kegiatan eksplorasi dimulai pada tahun 2006 akan berlangsung selama lima tahun. Jika perlu, tahap eksplorasi dapat diperpanjang. Pada bulan

---

<sup>6</sup> Abelson, P. H. (1976). Energy Diplomacy, American Association for the Advancement of Science. Science, New Series, Vol. 192, No. 4238, 429.

<sup>7</sup> Cohen, A. (2006). Russian Foreign Policy Kazakhstan: Energy Cooperation With rusia - Oil, Gas and Beyond, Global Market Briefing. London: GMB Publishing Ltd.

Mei 2006, sumur eksplorasi pertama dibor pada struktur Kurmangazy<sup>8</sup>.

Asia Tengah merupakan suatu kawasan di tengah Asia yang merupakan bekas wilayah Uni Soviet dan memerdekakan diri pada tahun 1990-an ketika Uni Soviet runtuh. Kawasan ini didiami oleh negara yang secara budaya serumpun, yakni Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgystan, Uzbekistan serta Tajikistan. Negara-negara Asia Tengah sebagian diantaranya adalah negara-negara yang baru merdeka dan notabene merupakan Negara-negara berkembang. Kawasan Asia tengah hingga saat ini masih mengalami banyak permasalahan dalam berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, social ,dan politik.

Secara ekonomi, kawasan Asia Tengah masih tergolong sebagai negara-negara berkembang. Hanya Kazakhstan yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik dibanding 4 negara Asia Tengah lainnya. Sejak kemerdekaan negara-negara Asia Tengah di tahun 1991, Asia Tengah harus mengalami setidaknya 4 permasalahan di sektor ekonomi. Pertama adalah masalah ketergantungan terhadap sumber daya alam<sup>9</sup>.

Kawasan ini menyimpan sumber daya alam strategis yang menjadi tumpuan utama di masing-masing negara. Seperti misalnya Kazakhstan yang memiliki kekayaan alam utama berupa minyak dan ini dijadikan Kazakhstan sebagai tumpuan ekonomi mereka yang utama.

Demikian halnya di negara-negara lain yang semuanya menggantungkan pada sumber daya alam tertentu. Ini yang menjadi salah satu isu dalam aspek ekonomi di kawasan Asia

---

<sup>8</sup> Rosneft. (2014). *Rosneft Russia*.

<sup>9</sup> Dharmaputra, R. (2015). *Central Asia II : Social, Economic, and Political Issues*. MBP Rusia, Eropa Timur, dan Asia Tengah SOH321 Universitas Airlangga, FISIP Universitas Airlangga.

Tengah. Tidak adanya diversifikasi menyebabkan kawasan ini begitu tergantung pada sumber daya alam utama yang jika suatu saat habis, maka berpotensi terjadi gejolak domestik. Kawasan ini memang juga tidak berniat untuk melakukan diversifikasi. Hal ini disebabkan karena untuk mengubah kebiasaan lama adalah sebuah hal yang sulit, mengingat kawasan Asia Tengah, masing-masing negaranya telah memiliki teknologi pengolahan sumber daya alam sejak lama, setidaknya sejak Uni Soviet berkuasa di kawasan ini<sup>10</sup>.

Kemudian, isu lain yang penting dalam kajian Asia Tengah adalah isu politik di kawasan ini. Negara-negara di kawasan Asia Tengah semuanya menerapkan sistem yang otoriter. Meskipun negara-negara di kawasan ini mengadopsi nama demokrasi ke dalam negaranya, namun pada faktanya, otoritarianisme dan sentralisasi kekuasaan pada presiden masih begitu kuat. Di 5 negara Asia Tengah, suksesi kekuasaan hampir jarang terjadi. Suksesi presiden akan terjadi apabila presiden tersebut meninggal atau telah menyiapkan penggantinya.

Isu demokrasi pun jarang muncul di negara-negara Asia Tengah. Masyarakat di kawasan ini tidak pernah merasa tertindas oleh otoritarianisme pemimpin mereka. Pemimpin mereka masih dipersepsi sebagai pemimpin yang mengayomi. Sehingga, yang terjadi belum ada tuntutan untuk melakukan demokratisasi. Faktor ekonomi yang masih baik-baik saja bagi masyarakat di Asia Tengah menjadi penyebab jaranganya dilakukan aksi demonstrasi atau kemunculan tuntutan-tuntutan demokrasi di negara-negara ini. Akan tetapi, ada kemungkinan jika kondisi ekonomi di negara-negara mereka mulai mengalami ketidakstabilan, tuntutan untuk menerapkan demokrasi bisa terjadi.

---

<sup>10</sup> *ibid*



Adanya perubahan arah kebijakan luar negeri Rusia di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin dan Vladimir Putin mengenai sumber daya energy. Kemudian fokus kebijakan energy Rusia dibawah Vladimir Putin diterapkan di Asia Tengah yang notabene merupakan kawasan yang masih terdapat beberapa masalah terkait stabilitas Negara. Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan tentang latar belakang pengambilan kebijakan oleh Vladimir Putin dalam menerapkan kebijakan energy Rusia di Asia Tengah. Oleh karena itu, penulis memilih judul “Kebijakan Energi Rusia di Asia Tengah Pada Masa Kepemimpinan Vladimir Putin”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis memilih pertanyaan penelitian yaitu : Mengapa Rusia menerapkan kebijakan energi di Asia Tengah pada masa kepemimpinan Vladimir Putin ?

## **C. Kerangka Teori**

Dalam mengkaji penerapan kebijakan energi Rusia di Asia Tengah , penulis menggunakan beberapa konsep yang relevan dengan pembahasan tentang penerapan kebijakan energi Rusia.

## **D. Konsep Kebijakan Luar Negeri**

Menurut Joshua Goldstein, pengertian Kebijakan Luar Negeri adalah kebijakan luar negeri adalah strategi-strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menentukan aksi mereka di dunia internasional<sup>11</sup>. Kemudian menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan berdasarkan gagasan

---

<sup>11</sup> Goldstein, J. (1999). International Relations. New York: Longman.

yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan<sup>12</sup>.

Kebijakan juga mengandung komponen tindakan, yakni hal yang dilakukan pemerintah kepada pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memnuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu.<sup>13</sup> Tindakan pada dasarnya merupakan satu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah negara yang bersangkutan.<sup>14</sup> Proses politik internasional dimulai bila negara katakanlah negara A berusaha melalui berbagai tindakan atau isyarat untuk mengubah atau mendukung perilaku. Misalnya, tindakan, citra dan kebijakan negara lain. Dengan demikian, kekuasaan dapat didefenisikan sebagai kemampuan umum suatu negara untuk mengendalikan perilaku negara lain.

Secara analitis, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara, dan fungsi yang paling umum adalah: 1. Melindungi keamanan nasional, misalnya, dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke aliansi keamanan dengan negara lain; 2. Menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan, misalnya, dengan membuka pasar luar negeri untuk ekspor dan investasi asing; 3. Membina pembangunan daerah strategis penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral, dan 4. Mendukung martabat manusia melalui,

---

<sup>12</sup> Holsti, K. J. (1983). *International Politics : A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 186

<sup>14</sup> Ibid,

misalnya, bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategi.<sup>15</sup>

Setiap negara memiliki tujuan kebijakan luar negeri yang berbeda-beda. Namun, tujuan negara menerapkan kebijakannya adalah guna memenuhi dan mencapai kepentingan negara secara pribadi maupun kolektif. Umumnya kebijakan luar negeri suatu negara diterapkan agar dapat mempengaruhi terhadap negara lain, menjaga keamanan nasional, memiliki *prestige*, serta manfaat untuk negaranya. Negara bertindak berdasarkan sumber daya yang ada.

Rosenau berpendapat bahwa tujuan dari kebijakan luar negeri sebuah negara merupakan hasil dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan kebijakan negara dipengaruhi oleh objek yang dilihat dari masa lalu dan sebuah untuk masa yang akan datang<sup>16</sup>. KJ. Holsti membagi tujuan kebijakan luar negeri menjadi tiga hal utama, yakni :

1. Nilai, sebagai faktor utama yang mendorong pemangku kebijakan, hal itu dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk mencapai tujuan.
2. Unsur Waktu, jangka waktu dicapainya suatu tujuan.
3. Jenis tuntutan tujuan, negara tujuan akan dibebankan dari negara yang mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Menurut KJ. Holsti, dua tujuan yang lebih utama adalah tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Tujuan

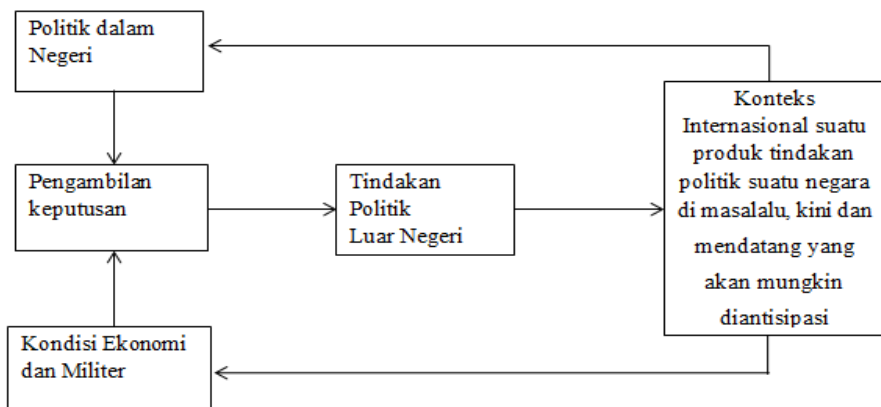
---

<sup>15</sup> David P Fidler. 2009. "HEALTH IN FOREIGN POLICY: AN ANALYTICAL OVERVIEW". Political Journal. Vol.15. No. 3. United Kingdom: Taylor & Francis Ltd., hal. 11. 117

<sup>16</sup> Rosenau, J. N. (1969). International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory. New York: The Free Press.

jangka menengah adalah meningkatkan prestise negara dalam sistem itu, indikatornya berdasarkan industri, teknologi, bantuan dana dan, militer. Kemudian Tujuan jangka panjang adalah sebuah rencana, impian dan pandangan mengenai organisasi politik atau ideology. Ideologi tersebut mengatur tindakan negara dalam sistem internasional. Bagi Rosenau tujuan jangka panjang adalah untuk perdamaian, kekuasaan dan keamanan<sup>17</sup>.

Terbentuknya kebijakan luar negeri didasari oleh faktor internal maupun eksternal, yang kemudian diseleksi oleh pembuat keputusan berdasarkan kepentingan yang utama bagi kondisi negaranya. Proses ini digambarkan oleh para akdemisi tentang skema proses perumusan kebijakan luar negeri sebagai berikut<sup>18</sup>



**Gambar 1. 1 Bagaimana Tiga Konsideran Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan**

*Sumber : William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional (Marbun, 2003)*

<sup>17</sup> ibid

<sup>18</sup> Perwita, A. B., & Yanyan, M. Y. (2011). Pengantar Hubungan Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Menurut bagan diatas, kondisi dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks internasional mempengaruhi politik luar negeri, namun presiden sebagai pembuat kebijakan yang bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional juga sangat berpengaruh. Politik luar negeri dilihat sebagai akibat dari tindakan aktor rasional. Untung rugi sangat diperhitungkan secara rasional oleh pengambil keputusan dimana ada kepentingan Negara atau pribadi dari pengambil keputusan ini<sup>19</sup>.

Dalam menganalisa model kebijakan luar negeri suatu negara, maka dapat dilihat berdasarkan level analisis yang akan membantu dari arah mana kebijakan tersebut dikeluarkan. Level analisis berjumlah tiga. Pertama, KLN yang dianalisis dari level individu (pemimpin). Kedua, KLN yang dianalisis dari level domestic negara. Ketiga, KLN yang dianalisis dari level sistem. Level analisis yang akan digunakan penulis dalam mengkaji penerapan strategi energi Rusia di Asia Tengah pada masa kepemimpinan Vladimir Putin adalah Level Analisis Individu, yaitu sang pemimpin, Vladimir Putin.

Level analisis individual berfokus pada individu pengambil keputusan, bagaimana mereka mengambil keputusan, persepsi dan mispersepsi apa yang mereka pegang, cara mereka berinteraksi dengan kelompok pengambil keputusan dan lain-lain<sup>20</sup>. Memahami latar belakang individu merupakan salah satu alat untuk menganalisis kebijakan luar

---

<sup>19</sup> Marbun, B. (2003). Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

<sup>20</sup> Neack, L. (2008). "The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era". Plymouth: Rowman & Littlefield Publisher. Hlm 10.

negeri dengan mengkombinasikan faktor-faktor lain yang didapat dari analisis di level berikutnya.

Menurut Bruening, penting untuk memahami kepribadian seorang pemimpin negara dibalik *public persona* nya. Pertama, memahami kepribadian pemimpin dapat membantu memahami pemimpin. Kemudian dapat berguna untuk memahami kekuatan dan kelemahan yang dibawa orang tersebut dalam posisi kepemimpinan. Kedua, pengetahuan tentang kepribadian pemimpin dapat memberi keuntungan pada hubungan diplomatik negara sehingga mampu mempengaruhi pemimpin negara lain untuk melakukan kebijakan luar negeri yang menguntungkan kepentingan nasional negaranya. Seringkali, apa yang tampak dari seorang pemimpin di mata publik jarang sekali merefleksikan kepribadiannya. Mengutip Machiavelli (dalam Bruening, 2007:35), jauh lebih penting untuk tampak baik di mata publik, daripada benar-benar menjadi baik. Karena itu untuk menganalisis kebijakan luar negeri dari level individual, perlu memahami pemimpin lebih dalam dari yang tampak di permukaan<sup>21</sup>.

Penggunaan konsep Kebijakan Luar Negeri akan membantu penulis untuk mengetahui tentang beberapa hal mengenai faktor yang melatarbelakangi penerapan strategi energi Rusia di Asia Tengah pada masa kepemimpinan Vladimir Putin. Konsep Kebijakan Luar Negeri menjelaskan bahwa tujuan dari berbagai macam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu negara memiliki satu tujuan utama, yakni penguatan power negara tersebut. National power merupakan alasan utama bagi suatu negara dalam mengambil suatu keputusan.

---

<sup>21</sup> Bruening, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan.

Oleh karena itu, setelah menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang digunakan untuk mengetahui faktor pengambilan keputusan Rusia, penulis akan menggunakan Teori Persepsi guna mengetahui faktor yang melatarbelakangi pengampun keputusan yakni Putin dalam penerapan kebijakan energi Rusia di Asia Tengah.

## **E. Teori Presepsi**

Leavitt mendefinisikan persepsi dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>22</sup> Menurut Desiderato persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>23</sup>

Menurut David Krech dan Richard S. Krutch persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional dan faktor struktural.<sup>24</sup> Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang bersifat personal, seperti proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya, latar belakang budaya, pendidikan yang kesemuanya diwarnai oleh nilai kepribadiannya. Sementara itu faktor struktural adalah faktor yang datang dari luar individu, dalam hal ini adalah stimulus dan lingkungan.

---

<sup>22</sup> Alex Sobur. (2003). Psikologi Umum. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>23</sup> Rahmat, Jalaludin. 1999. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>24</sup> Ibid,

Menurut Sobur, ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>25</sup> Faktor internal terdiri dari kebutuhan psikologis individu, latar belakang, pengalaman masa lalu, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum, serta penerimaan diri, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah intensitas rangsangan, ukuran, kekontrasan rangsangan, gerakan, ulangan, keakraban, serta sesuatu yang baru.

## **F. Konsep Geopolitik**

Konsep yang akan digunakan setelah konsep Kebijakan Luar Negeri dan Teori Persepsi adalah konsep Geopolitik. Geopolitik menurut Rudolf Kjellen adalah “Mempelajari Politik dari aspek Geografi”, kemudian pengertian ini dikembangkan oleh Evans, G & Newnham, J. menjadi “Geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Variabel geografi tersebut umumnya mengarah pada: lokasi geografis negara, ukuran negara, iklim wilayah, topografi wilayah, demografi, sumber daya alam, dan perkembangan teknologi<sup>26</sup>”.

Menurut konsep geopolitik, perilaku Negara-negara ditentukan oleh kondisi geografis, politik, dan ekonomi. Kemudian Henry Kissinger mengatakan bahwa “Negara tidak mempunyai prinsip, hanya kepentingan”. Doktrin ini mempunyai sedikit kesamaan dengan doktrin *liassez-faire*. Bagi *liassez-faire*, subyek itu adalah individu partisipan pasar, bagi geopolitik subyek itu adalah negara<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Ibid,

<sup>26</sup> Newnham, J., & Evans, G. (1998). *The Penguin Dictionary of International relations*. Penguin Books.

<sup>27</sup> Soros, G. (2007). *Open Society: Reforming Global Capitalism*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



Dari buku Martin John dkk, mereka mendefinisikan *political geography* sebagai studi tentang proses-proses politik, yang berbeda dengan ilmu politik lainnya, yang penekanannya didasarkan pada pengaruh geografi suatu negara dan analisis spasial<sup>28</sup>. Definisi tersebut menjelaskan pengaruh yang cukup signifikan bagi suatu negara dalam menentukan kebijakan politik luar negeri, yang terkait dengan kondisi geografis. Politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain sangat ditentukan oleh letak geografis, di samping itu untuk memetakan kekuatan politik negara-negara lainnya.

Geopolitik juga mampu membuka rute perdagangan baru dan inovasi teknologi dalam transportasi dan/atau komunikasi, ada secara independen dari motivasi strategis politisi atau geostrategi mereka<sup>29</sup>. Negara yang melindungi wilayah rumah mereka (dan kuasanya), dan politik mengontrol sumber daya dan jalur transportasi mereka akan meningkatkan dan mempertahankan kekuatan relatif mereka.

Penggunaan konsep ini selaras dengan kebijakan luar negeri Rusia yang memiliki fokus pada penguatan politik wilayah. Pengaruh yang dimiliki oleh Rusia terhadap negara-negara di sekitar Rusia berusaha dipertahankan oleh Vladimir Putin melalui kebijakan-kebijakannya. Hal ini disadari oleh Putin dimana jika ingin mempertahankan kekuatan Rusia maka harus dimulai dengan penguatan pengaruh di wilayah sekitar Rusia.

---

<sup>28</sup> Martin dkk, J. (2004). *An Introduction to Political Geography, Space, Place and Politics*. London: Routledge.

<sup>29</sup> Dannreuther, R. (2010, September 8).  
International Relations Theories: Energy,  
Minerals and Conflict. POLINARES.

## **G. Hipotesis**

Penerapan kebijakan energi Rusia di Asia Tengah pada masa kepemimpinan Vladimir Putin dilatar belakangi oleh kepentingan Vladimir Putin tentang penguatan geopolitik Rusia.

## **H. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor yang melatar belakangi penerapan kebijakan energi Rusia di Asia Tengah pada masa kepemimpinan Vladimir Putin.
2. Mengetahui tujuan pembuatan kebijakane nergi di Asia Tengah pada masa kepemimpinan Vladimir Putin.

## **I. Batasan Penelitian**

Dalam upaya membatasi cakupan atas pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian akan dibatasi dimana hanya akan mengambil pokok bahasan yang berkaitan dengan penerapan kebijakan energi Rusia dalam penguatan geopolitik dibawah kepemimpinan Vladimir Putin.

## **J. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dijelaskan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahmilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mesintesiskannya mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan penelitian secara utuh<sup>30</sup>.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode eksplanatori adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis guna memperkuat atau mematahkan hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya<sup>31</sup>. Tujuan dari metode penelitian eksplanatori adalah memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hubungan sebab-akibat antara berbagai variable dari permasalahan yang diteliti. Artinya, metode penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan “mengapa”<sup>32</sup>.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Melalui teknik ini, data-data akan dihimpun dengan mengambil data sekunder dengan sumber dan jenis yang variatif, mulai dari data tabel dan grafik hingga fakta-fakta empiris, yang berasal dari buku, artikel jurnal, internet, majalah dan surat kabar.

## **K. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB I akan diawali dengan latar belakang masalah yang berisi tentang pemaparan kondisi Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet dan arah kebijakan Vladimir Putin dengan pendahulunya yakni Boris Yeltsin dalam sector pengelolaan sumber daya energy. Kemudian dipaparkan juga tentang

---

<sup>30</sup> Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

<sup>31</sup> Nachimas, D., & Chava, N. (1987). *Research Methods in the Social Sciences*. New York: St. Martin's Press.

<sup>32</sup> Lady, P. D., & Ormrod, J. E. (2010). *Practical Research Planning and Design*. USA: PEARSON education.

kondisi Asia Tengah yang masih terdapat banyak masalah di bidang ekonomi maupun politiknya. Kemudian sebagai latar belakang masalah menciptakan suatu pertanyaan yang dimana akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini.

Selain itu pada bab pertama ini akan dijelaskan juga tentang teori yang digunakan oleh penulis, hipotesa yang didapat, tujuan dari penelitian yang dilakukan dan juga jangkauan penelitian guna membatasi lingkup penelitian agar tidak keluar dari tujuan awal. Selain itu, dijelaskan juga tentang metode yang digunakan dalam mendapatkan data dan analisis yang dilaksanakan penulis.

Bab II berisikan tentang sejarah singkat kondisi Rusia dimulai sejak pasca runtuhnya Uni Soviet. Kemudian dipaparkan juga sejarah singkat Negara-negara di Asia Tengah untuk membantu penulis dalam menganalisa faktor yang mendorong penerapan kebijakan Rusia di Asia Tengah.

Bab III akan dipaparkan perbedaan arah kebijakan pada masa kepemimpinan Boris Yeltsin dengan arah kebijakan Rusia pada masa kepemimpinan Vladimir Putin. Perbedaan pandangan antara kedua pemimpin juga akan dibahas guna membantu penulis dalam menganalisa penerapan kebijakan energy Rusia di Asia Tengah pada masa kepemimpinan Vladimir Putin.

Bab IV akan diisi oleh kajian yang berisikan data dan analisis penulis dimana proses ini dilakukan dengan menganalisa kebijakan Rusia menggunakan teori yang telah dipilih oleh penulis sebelumnya.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan berisikan tentang refleksi yang penulis dapatkan setelah membahas dan menganalisa data penelitian. Kemudian dipaparkan juga saran atau rekomendasi bagi penelitian yang dapat dilakukan dikemudian hari.